BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah pengelolaan sampah di Indonesia semakin banyak seiring dengan pertu vmbuhan jumlah penduduk dan pesatnya proses jumlah penduduk.Kenaikan populasi dan aktivitas ekonomi yang meningkat secara langsung memicu bertambahnya volume sampah harian, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan produksi sampah terbesar, terutama sampah plastik yang sulit terurai dan berdampak buruk pada lingkungan. Fenomena ini sering disebut sebagai “darurat sampah plastik” karena konsekuensinya yang serius terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.(Lingga et al. 2024)

Sampah merupakan hasil dari aktivitas manusia yang telah kehilangan nilai guna dan tidak lagi dapat dimanfaatkan. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah akan mengancam keseimbangan ekosistem. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), beberapa angka kunci yang menunjukkan hal tersebut antara lain: Total Timbulan Sampah Harian: Indonesia menghasilkan sekitar 140.000 hingga 185.000 ton sampah setiap harinya. Data nasional menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan sampah dalam jumlah sangat besar setiap hari,

namun penanganannya masih belum optimal. Peningkatan volume sampah ini tidak hanya menurunkan kualitas lingkungan, tetapi juga mempercepat kerusakan ekosistem serta memperburuk kondisi iklim akibat gas metana yang dihasilkan dari tumpukan sampah organik.

Ketidakefisienan pengelolaan sampah berimbas tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat. Pencemaran air dan tanah akibat pembuangan sampah sembarangan serta risiko penyebaran penyakit melalui vektor seperti nyamuk dan tikus menjadi ancaman serius di berbagai daerah. Kondisi ini diperparah oleh minimnya infrastruktur pengelolaan sampah, rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemilahan dan pengurangan sampah, serta lemahnya penerapan kebijakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat agar masalah sampah dapat diselesaikan secara berkelanjutan.

Pengelolaan sampah sendiri adalah suatu sistem terpadu yang mencakup seluruh tahap, mulai dari pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, hingga pengolahan akhir sampah. Sistem ini bertujuan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, mendaur ulang atau memanfaatkan kembali bahan yang masih berguna, serta membuang dengan aman sampah yang tidak bisa dimanfaatkan lagi. Keberhasilan pengelolaan sampah memerlukan

peran aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan, menyediakan fasilitas, serta memastikan pengelolaan sampah berjalan efektif di tingkat lokal.
Dalam konteks pariwisata, pengelolaan sampah menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Peningkatan aktivitas wisata berdampak langsung pada volume sampah, khususnya di kawasan wisata alam seperti hutan mangrove. Contohnya adalah Hutan Mangrove Biringkassi di Desa Bulu Cindea, Kabupaten Pangkep kecamatan bungoro. Kawasan ini berpotensi menjadi destinasi wisata alam yang mengedepankan edukasi dan konservasi. Namun, peningkatan kunjungan wisata juga menimbulkan masalah timbunan sampah yang belum tertangani dengan baik oleh pengunjung maupun masyarakat sekitar.(Rustiana et al. 2024)

Peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam hal ini. Melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata, pemerintah diharapkan dapat menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di kawasan wisata. Pemerintah juga harus memastikan tersedianya fasilitas kebersihan yang memadai, sistem pengangkutan sampah yang efisien, serta membangun kerja sama dengan masyarakat dan sektor swasta demi menjaga kelestarian lingkungan wisata. Namun, dalam prakteknya, terdapat berbagai

kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan wisata.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan analisis yang mendalam mengenai peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di area wisata Hutan Mangrove Biringkassi, Kabupaten Pangkep. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran sejauh mana pemerintah daerah telah menjalankan tanggung jawabnya dalam menangani limbah di sektor pariwisata, mengidentifikasi hambatan yang muncul selama proses pengelolaan, serta merancang strategi pengelolaan sampah yang efektif, berkelanjutan, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Sebagai langkah untuk memperkuat pengelolaan, pemerintah telah menciptakan sistem informasi pengelolaan limbah di tingkat nasional yang berfungsi sebagai pusat data dan pemantauan. Sistem ini menyediakan informasi mengenai sumber dan jumlah limbah yang dihasilkan, rincian komposisi bahan, karakteristik limbah, serta infrastruktur yang ada untuk pengumpulan dan pengolahan limbah.(City 2024)

Pengelolaan kawasan ekowisata Hutan Mangrove Biringkassi mulai dikembangkan sejak tahun 2019 dengan tujuan melestarikan hutan mangrove yang tersisa sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar. Dalam pengembangannya, partisipasi masyarakat menjadi unsur penting

agar kegiatan wisata dapat berjalan berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem. Selain itu, kawasan ini juga dikembangkan dengan memperhatikan aspek perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjadi pedoman dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan mengelola potensi sumber daya alam secara berkelanjutan.

Hutan mangrove memiliki potensi besar untuk memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat ini dapat dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar hutan mangrove maupun yang berada di wilayah yang lebih jauh. Namun, hutan mangrove saat ini menghadapi berbagai tekanan yang mengancam kelestariannya. Faktor-faktor seperti pencemaran lingkungan, perubahan tata guna lahan yang mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan, dan membuang sampah yang berlebihan merupakan penyebab utama kerusakan ekosistem ini. Hal ini sangat disayangkan mengingat mangrove berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan menopang kehidupan di sekitarnya.Oleh karena itu, perlindungan dan pelestarian hutan mangrove memerlukan perhatian serius dari pemerintah, terutama melalui program konservasi yang efektif. Salah satu sektor yang

menjanjikan dan dapat dikembangkan tanpa mengancam kelestarian mangrove adalah pariwisata. Di Kabupaten Pangkep, khususnya di kawasan wisata hutan mangrove Biringkassi, pengelolaan sampah merupakan salah satu tantangan utama yang perlu segera diatasi. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat merusak lingkungan dan mengurangi kenyamanan pengunjung. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat penting dalam mengelola sampah di kawasan wisata ini secara optimal. Dengan pengelolaan sampah yang tepat, diharapkan hutan mangrove Biringkassi dapat berkembang menjadi destinasi wisata yang bersih, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar.(Ii and Pustaka 2008)

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini didasari oleh pentingnya pengelolaan kawasan wisata hutan mangrove yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan secara kolaboratif. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam penanganan dan pengurangan sampah di kawasan wisata hutan mangrove Biringkassi Kabupaten Pangkep?

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di kawasan wisata hutan mangrove Biringkassi Kabupaten Pangkep?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam penanganan dan pengurangan sampah di kawasan wisata Hutan Mangrove Biringkassi Kabupaten Pangkep.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di kawasan wisata Hutan Mangrove Biringkassi Kabupaten Pangkep.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis.

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam aspek manajemen limbah dan pelestarian lingkungan di area pariwisata hutan bakau. Temuan dari studi ini juga bisa menjadi acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang mengkaji fungsi pemerintah daerah serta pengelolaan

limbah dalam rangka menjaga ekosistem pantai.

b) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah daerah Kabupaten Pangkep dalam merancang dan meningkatkan program pengelolaan sampah di kawasan wisata hutan mangrove Biringkassi. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan untuk mengambil langkah strategis dalam mengatasi kendala yang ada, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengelola wisata akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan demi terciptanya destinasi wisata yang bersih, nyaman, dan berkelanjutan.

1.4 Tinjauan Pustaka

1.4.1 Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah suatu proses yang dirancang secara sistematis dan berkelanjutan yang mencakup langkah-langkah pengurangan serta penanganan limbah. Menurut dokumen akademis Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Limbah, limbah didefinisikan sebagai hasil dari aktivitas atau usaha yang berupa material padat atau semi-padat, baik yang bersifat organik maupun anorganik, yang dapat terurai maupun tidak, dan dianggap tidak berguna sehingga dibuang ke lingkungan.Limbah

merupakan konsep yang diciptakan oleh manusia, karena secara alami dalam proses alamiah tidak dikenal limbah melainkan hanya produk yang tidak aktif. Limbah dapat berbentuk padat, cair, atau gas. Jika dilepaskan dalam bentuk cair atau gas, limbah sering disebut sebagai emisi yang umumnya terkait dengan pencemaran lingkungan. Dalam aktivitas sehari-hari, limbah dalam jumlah besar biasanya berasal dari sektor industri seperti pertambangan, manufaktur, dan konsumsi, di mana hampir seluruh produk industri pada akhirnya menjadi limbah dengan volume yang sebanding dengan tingkat konsumsi masyarakat.

Limbah padat terdiri dari berbagai bahan seperti plastik, logam (aluminium, besi), kaleng, kaca, dan lainnya. Sedangkan limbah cair berupa cairan rembesan dari proses pembusukan (leachate) yang berpotensi mencemari sumber air tanah dan sungai, serta dapat membawa bakteri berbahaya seperti E. coli dan logam berat. Pengelolaan pengumpulan dan pembuangan sampah di kawasan permukiman merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang harus dijalankan secara optimal. Namun, karena adanya prioritas pembangunan lain dan keterbatasan anggaran, pengelolaan limbah di beberapa wilayah belum berjalan efektif. Masalah ini juga diperparah oleh belum adanya penerapan prinsip tanggung jawab produsen terhadap pengelolaan limbah dari produk yang mereka hasilkan.

Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia.

Hampir setiapaktivitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Sampah dapat dalam bentuk padat, cair, atau gas. Sampah terbentuk dari berbagai sumber, salah satunya dari konsumsi manusia sebagai pengguna barang. Sebenarnya, sampah dapat berasal dari aktivitas nuklir,industri, pertambangan dan manusia sendiri dalam bentuk feses dan urin.1 Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap barang/material yang kita gunakan sehari-hari. Demikian juga dengan jenis sampah,sangat bergantung dari jenis material yang kita konsumsi. Peningkatan jumlah penduduk dan gaya hidup sangat berpengaruh pada jumlah dan banyaknya sampah. 2 Peningkatan kegiatan perekonomian dari sektor pendidikan, pariwisata, pelayanan kesehatan, inovasi teknologi dan industri turut berkontribusi pada peningkatan jumlah sampah dan karakteristiknya. Perubahan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat juga meningkatkan karakteristik sampah, menambah keanekaragaman sampah yang dihasilkan sesuai dengan material yang dikonsumsi.Sampah yang tidak dikelola dengan baik memberikan kontribusi besar bagi rusaknya lingkungan hidup, dimana lingkungan menjadi kotor, mengakibatkan timbunan sampah yangdikemudian hari dapat menjadi sumber bibit penyakit dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Permasalahan sampah bukan hanya permasalahan adanya material sisa yang tidak digunakan lagi dan tidak bernilai.

Permasalahan sampah merupakan permasalahan lingkungan yang dapat merusak ekosistem apabila tidak mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Untuk itu, perlu dilakukan pengelolaan sampah agar tidak mencemari lingkungan.(Elamin et al. 2016)a

1.4.2 Wisata Hutan Mangrove

Hutan magrove merupakan sekumpulan pepohonan yang tumbuh di area sekitar garis pantai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut serta berada pada tempat yang mengalami akumulasi bahan organik dan pelumpuran. Hutan mangrove yang juga biasa dikenal dengan sebutan hutan bakau ini merupakan sebuah ekosistem yang bersifat khas karena adanya aktivitas daur penggenangan oleh pasang surut air laut. Pada habitat ini hanya pohon mangrove / bakau yang mampu bertahan hidup dikarenakan proses evolusi serta adaptasi yang telah dilewati oleh tumbuhan mangrove. Hutan mangrove memiliki fungsi yang sangat besar bagi lingkungan hidup kita diantarnya yakni 1) sebagai tumbuhan yang mampu menahan arus air laut yang mengikis daratan pantai, dengan kata lain tumbuhan mangrove mampu untuk menahan air laut agar tidak mengikis tanah di garis pantai. 2) Sebagaimana fungsi tumbuhan yang lain, mangrove juga memiliki fungsi sebagai penyerap gas karbondioksida (CO2) dan penghasil oksigen (O2). 3) Hutan mangrove memiliki peran sebagai tempat hidup berbagai macam biota laut seperti ikan-ikan

kecil untuk berlindung dan mencari makan. Selain binatang laut, bagi hutan mangrove yang ruag lingkupnya cukup besar sering terdapat jenis binatang darat di dalamnya seperti kera dan burung.Dari beberapa fungsi hutan bakau yang telah dipaparkan di atas, tentunya hal yang paling esensial bagi kelangsungan hidup kita adalah fungsi hutan mangrove sebagai penghasil oksigen (O2) dan penyerap gas karbondioksida serta sebagai pencegahan abrasi. Rusaknya hutan mangrove dapat mengakibatkan hilangnya fungsi-fungsi di tersebut. Bayangkan jika hutan rusak, tak ada lagi sesuatu yang mampu menghasilkan oksigen (O2) untuk kita bernapas, tidak adalagi sesuatu yang dapat menyerap gas (CO2) yang merupakan gas racun dab berbahaya bagi tubuh manusia, serta tak ada lagi suatu pertahanan kokoh yang mampu menahan laju abrasi. Saat ini keadaan hutan mangrove di sepanjang pesisir pantai Indonesia begitu memperihatinkan. Sebagian besar rusak dan diantaranya habis akibat aktivitas penebangan dan lain-lain. Hal ini tentu akan berdampak buruk bagi kelestarian lingkungan hidup kita.

Mengingat begitu pentingnya hutan mangrove bagi kelangsungan lingkungan hidup kita, perlu adanya solusi untuk penanggulangan masalah yang selama ini terjadi pada hutan mangrove. Solusi yang dapat kita lakukan diantaranya yakni ; 1) perlu adanya lahan konservasi terhadap hutan mangrove dalam rangka penjagaan dan pelestarian hutan agar fungsi-fungsi mangrove dapat

dioptimalkan sebaik mungkin. 2) melakukan reboisasi atau penanaman kembali terhadap hutan mangrove yang telah rusak. Dalam hal ini perlu adanya keterlibatan antara pemerintah dan warga secara teknis dalam pelaksanaan reboisasi. 3) Perlu adanya manajemen tata ruang yang baik terhadap wilayah pesisir pantai berhutan mangrove, sehingga dapat berpotensi ekonomis dalam hal pariwisata. Provit yang diperoleh dari wisata alam ini dapat digunakan untuk keterbutuhan pelestarian mangrove. 4) perlu adanya penyuluhan dalam rangka memahamkan masyarakat terhadap pentingnya kelestarian hutan mangrove bagi lingkungan hidup. 5) Sanksi hukum yang tegas terhadap siapapun yang merusak kelestarian hutan mangrove. Kelestarian lingkungan hidup amatlah penting bagi kita. Menjaga mangrove merupakan bagian dari tindakan nyata atas kepedulian kita terhadap lestarinya alam dan kehidupan. Mulai dari diri sendiri, marilah jaga lingkungan demi hidup dan kehidupan.(Rustiana et al. 2024)

1.4.3 Peran Pemerintah

Peran pemerintah adalah menciptakan keamanan dasar hingga perhatian dalam urusan pemerintah dan mengatur jalannya peraturan yang berlaku dalam masyarakat untuk menciptakan suasana yang nyaman, adil dan terarah. dalam mengklasifikasikan berbagai peran pemerintah kedalam tiga

kelompok, yakni:

a. Fungsi pengaturan, dalam hal ini dapat berupa penentuan kebijakan, Pemberian pengarahan dan bimbingan, pengaturan melalui perjanjian serta pengawasan.
b. Pemilik sendiri dari usaha-usaha ekonomi atau sosial yang menyelenggarakannya dapat dilakukan sendiri atau swasta.
c. Penyelenggaraan sendiri dari berbagai kegiatan ekonomi ataumsosial.
d. Fungsi pemerintah dalam kaitannya dalam pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat.

Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:

a. Pemerintah sebagai Regulator

   Peran pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan sebagai regulator. Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala menurut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.
b. Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai Dinamisator adalah menggerakan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah.Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara insentif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

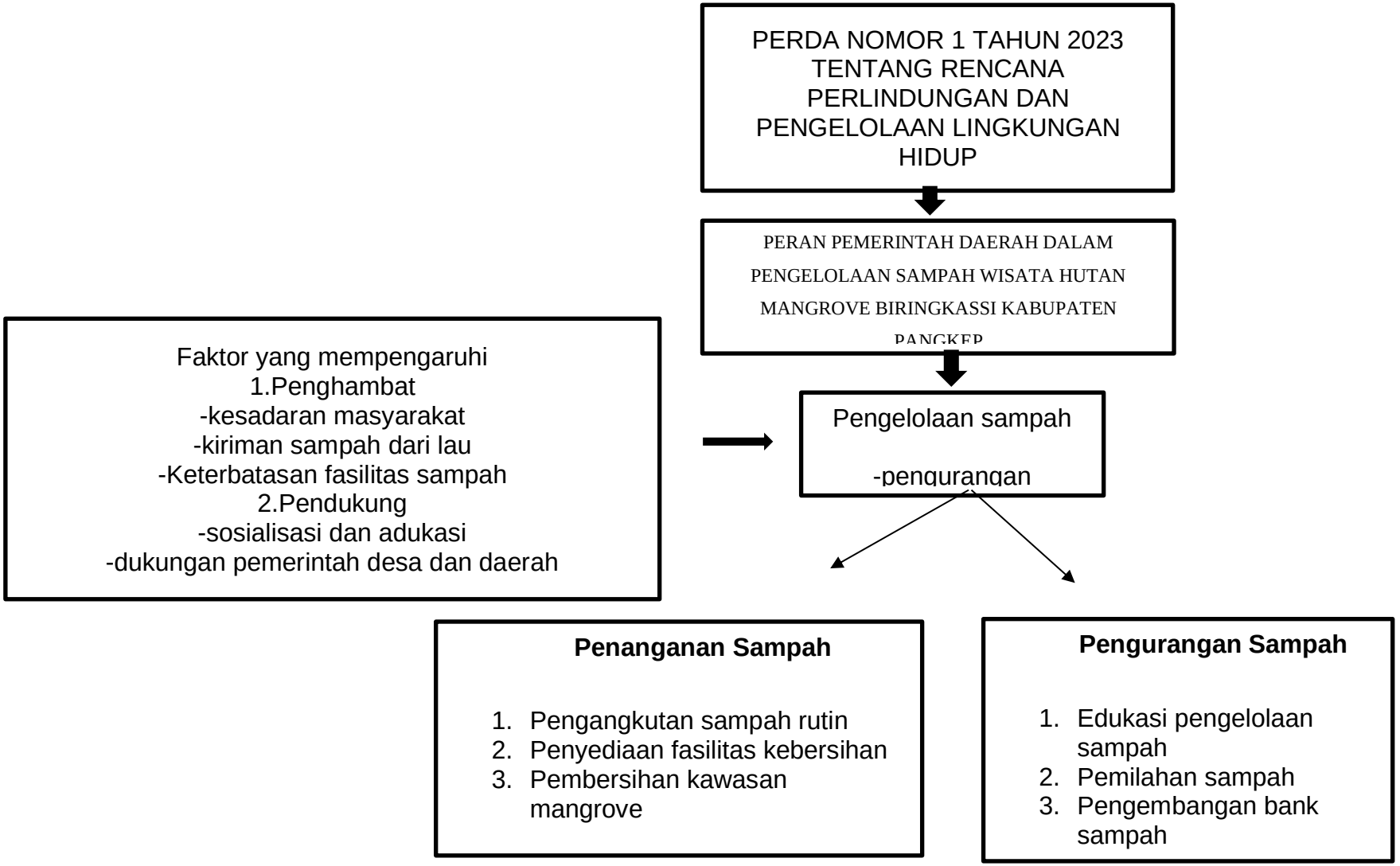
c. Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai macam kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan. 13 Selain itu kosep peran pemerintah dalam proses pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkelanjutan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.(Weeks 2023)

1.5 Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah gambaran hubungan antara konsep-konsep inti yang dianalisis untuk memberikan penjelasan tentang arah serta cara berpikir peneliti dalam mengatasi isu penelitian. Kerangka ini menggambarkan bagaimana teori, variabel, dan konsep saling berkaitan, serta berfungsi sebagai fondasi dalam merumuskan hipotesis atau analisis penelitian. Peran pemerintah daerah umumnya memiliki pedoman kebijakan utama dalam manajemen ruang kota sebagai pengelola pembangunan dan penyedia layanan dalam pengelolaan sampah ondisi pengelolaan sampah di kawasan wisata Hutan Mangrove Biringkassi, Kabupaten Pangkep, yang belum berjalan secara optimal. Peningkatan aktivitas wisata dan kegiatan masyarakat di sekitar kawasan tersebut berkontribusi terhadap bertambahnya timbulan sampah, sementara sistem pengelolaannya masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan yang muncul meliputi keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, belum optimalnya pemilahan dan pengurangan sampah di sumber, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pengelola di lapangan.Dalam konteks pemberdayaan, pemerintah berfungsi untuk mendorong masyarakat menuju kemandirian dan pembangunan guna mencapai kesejahteraan, tanpa sepenuhnya membebankannya kepada masyarakat. Layanan pemerintah dalam pengelolaan

sampah mencerminkan upaya untuk memfasilitasi, mengembangkan, serta melaksanakan pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah di hutan mangrove biringkassi. Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran dibuat untuk menguraikan cara pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di area wisata Hutan Mangrove Biringkassi, berlandaskan pada prinsip-prinsip perlindungan serta pengelolaan lingkungan. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah dari Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan program pelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah di wilayah hutan mangrove.(Nababan 2024). Adapun gambar kerangka pikir penelitian saya sebagai berikut :



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis / Universitas	Tahun	Fokus Utama	Relevansi dengan Proposal
1	Strategi Pengelolaan Sampah di Kawasan Wisata Situ Bagendit Kabupaten Garut	Rustiana	2024	Pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitator, dan pengawas, namun terkendala partisipasi masyarakat	Mendukung variabel peran pemerintah daerah dan pengelolaan sampah wisata
2	Implementasi UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	nababan	2024	Pengurangan dan penanganan sampah belum optimal karena	Menjadi dasar normatif kerangka pikir berbasis

				lemahnya pengawasan	UU No.18 Tahun 2008
3	Analysis of Waste Management in the Village of Disanah	Elamin	2016	infrastruktur dan kesadaran masyarakat mempengaruhi efektivitas pengelolaan sampah	Menguatkan faktor pendukung dan penghambat dalam kerangka pikir
4	Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Kawasan Wisata Hutan Mangrove Klawalu Kota Sorong	City	2024	Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan wisata mangrove	Relevan dengan koordinasi DLH, pemerintah desa, dan pengelola wisata
5	Pengelolaan Sampah di Kawasan Wisata Berbasis	Rustiana	2024	Sinergi pemerintah dan masyarakat	Menguatkan hubungan peran pemerintah

	Lingkungan			meningkatkan kebersihan kawasan wisata	– pengelolaan sampah – keberlanjutan wisata
6	Sampah di Indonesia: Tantangan dan Solusi Menuju Perubahan Positif	Lingga	2024	Pengurangan sampah dari sumber menjadi kunci pengelolaan berkelanjutan	Menguatkan aspek pengurangan sampah dalam kerangka pikir
7	Community Empowerment Program	Weeks	2023	Partisipasi masyarakat memperkuat kebijakan pemerintah	Mendukung konsep pemerintah sebagai dinamisator dan fasilitator

BAB II
METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep dan Kawasan Wisata Hutan Mangrove Biringkassi, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Fokus utama penelitian ini adalah pada peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep dalam pengelolaan sampah wisata, khususnya bagaimana Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata berkoordinasi dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan lingkungan di kawasan wisata pesisir. Lokasi ini dipilih karena Kabupaten Pangkep merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata berbasis ekosistem mangrove, namun masih menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan sampah dan pelibatan masyarakat secara optimal. Selain itu, karakter masyarakat pesisir yang memiliki kedekatan dengan sumber daya alam menjadikan studi ini menarik, karena nilai-nilai lokal dan perilaku masyarakat sering kali memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan lingkungan. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama dua bulan, yaitu mulai dari November hingga Desember 2025, agar peneliti dapat melakukan pengumpulan data secara mendalam sesuai dengan prinsip penelitian kualitatif.

Pemilihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep sebagai

lokasi utama penelitian memiliki dasar teoretis yang kuat. Dalam perspektif administrasi publik, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah kebijakan lingkungan, karena memiliki kewenangan dalam perumusan, pelaksanaan, serta pengawasan program pengelolaan sampah di wilayahnya. Dinas Lingkungan Hidup, sebagai pelaksana teknis kebijakan di bidang persampahan, berperan penting dalam merancang strategi pengurangan, penanganan, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Selain itu, Dinas Pariwisata Kabupaten Pangkep juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini karena sektor pariwisata sangat terkait dengan kebersihan dan kelestarian lingkungan kawasan wisata, termasuk Hutan Mangrove Biringkassi yang menjadi salah satu destinasi unggulan daerah. Dengan demikian, menempatkan penelitian di instansi pemerintah daerah memungkinkan peneliti memperoleh data primer yang relevan tentang bagaimana kebijakan pengelolaan sampah dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi di tingkat lokal.

2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis teliti, maka digunakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut prinsip dasar

metodologi penelitian, Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.Metode deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi suatu keadaan, situasi atau kondisi lain, dan hasilnya disajikan dalam bentuk laporan penelitian Peneliti tidak mengubah, menambah atau memanipulasi objek atau bidang penelitian. Peneliti memotret apa yang terjadi pada objek atau area yang diteliti dan menggambarkannya secara langsung dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian ini juga merupakan studi lapangan, dan karena sebagian besar kegiatan penelitian kualitatif berkaitan dengan lapangan, maka peneliti hendaknya lebih dekat dengan orang-orang di lingkungan penelitian agar informasi yang diperoleh sesuai dengan kenyataan yang ada. Penelitian lapangan adalah yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Karena itu primernya merupakan data yang berasal dari lapangan sehingga data yang didapat sesuai dengan realita. Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.Pendekatan kualitatif dipilih karena objek kajiannya adalah proses, tindakan atau aktivitas beberapa orang dan sesuai

dengan sifat dan tujuan peneliti yang ingin mendapatkan gambaran pemahaman sosial yang sebenarnya.

2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini laksanakan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep dan Kawasan Wisata Hutan Mangrove Biringkassi, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi penelitian ini dipilih di Kabupaten Pangkep karena daerah ini sedang gencar mengembangkan program pengelolaan sampah berbasis pemerintah daerah, khususnya di kawasan wisata Hutan Mangrove Biringkassi. Selain itu, Kabupaten Pangkep memiliki potensi ekowisata yang berkembang pesat sehingga pengelolaan sampah menjadi isu penting yang perlu dikaji secara mendalam. Waktu penelitian diperkirakan berlangsung selama kurang lebih dua bulan.

2.3 Sumber Data

Menurut, sumber data merupakan elemen krusial dalam penelitian kualitatif, karena kualitas data yang diperoleh akan sangat memengaruhi kedalaman analisis dan validitas temuan peneliti Dalam penelitian ini, sumber data akan dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder:

a) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpu data. Data primer pada penelitian ini yaitu data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti.Data primer yang diperoleh peneliti dengan cara pengisian kuesioner oleh responden.(Studi, Publik, and Administrasi 2023).

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak lansung melalui sebuah perantara. Data sekunder dapat didapatkan melalui bukti, catatan, buku, jurnal, atau laporan historis yang sudah tersusun dalam arsip atau data dokumen.(Arvyanda, Fernandito, and Landung 2023).

2.4 Adapun Informan Penelitian ini antara lain:

a. Staf bidang persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep.
b. Kepala Desa Biringkassi sebagai pihak pemerintah desa yang terlibat dalam pengelolaan kawasan wisata.
c. Pelaku Usaha atau pedagang di wisata hutan mangrove biringkassi.
d. Pengunjung wisata hutan magrove biringkassi

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini merupakan tahapan penelitian yang paling penting karena bertujuan untuk memperoleh informasi. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Langsung

   Observasi adalah langkah mengawasi secara teratur aktivitas manusia dan penataan fisik tempat di mana kegiatan ini berlangsung secara berkelanjutan dari lokasi aktivitas yang bersifat alami untuk menciptakan informasi.(Pratiwi et al. 2024)

   Observasi menurut Sugiyono (2019) menunjukkan bahwa dengan melakukan observasi, peneliti dapat memahami secara langsung perilaku serta arti dari perilaku tersebut di lokasi untuk mengidentifikasi apa yang berlangsung dan mengonfirmasi kebenaran dari penelitian yang akan dikerjakan.

2. Wawancara

   Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti memiliki pedoman pertanyaan pokok, tetapi tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan lebih luas sesuai pengalaman mereka. Informan yang diwawancarai meliputi pemerintah desa dan staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep, aparat

desa/kelurahan,masyarakat,pedagang di wisata hutan mangrove biringkassi.

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data melalui dokumen atau catatan yang sudah ada. Istilah dokumentasi berasal dari kata dokumen yang merujuk pada barang-barang tertulis. Dalam menerapkan metode dokumentasi, peneliti mengeksplorasi berbagai benda tertulis, seperti buku, majalah, notul rapat, serta catatan harian. Metode dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan informasi atau data melalui pemeriksaan arsip dan dokumen yang ada. Strategi dokumentasi juga bisa dianggap sebagai teknik pengumpulan data yang diserahkan kepada subjek penelitian. Di dalam penelitian ini, teknik dokumentasi memiliki peran penting bagi peneliti sebagai bukti yang dapat dipertanggung jawabkan, termasuk dokumen yang dapat dilampirkan dalam bentuk foto.(Khoirunnisa, Dasar, and Tangerang 2022)

2.6 Fokus Penelitian

1. Pemerintah daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah **Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep (DLH)** sebagai instansi utama yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di kawasan wisata Hutan Mangrove Biringkassi. Penelitian ini difokuskan untuk

memahami bagaimana DLH merencanakan kebijakan pengelolaan sampah, melaksanakan program di lapangan, serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas kegiatan tersebut.

2. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis

   sampah rumah tangga yang di maksudkan sesuai dengan UU No.18 Tahun 2008 Tentang pengelolaan sampah terdiri atas:

   a. Pengurangan

      Pengurangan sampah meliputi kegiatan sebagai berikut:

      i) Pembatasan timbulan sampah.
      ii) Pendauran ulang sampah.
      iii) Pemanfaatan kembali sampah.

   b. Penanganan

      i) Pemilahan sampah berdasarkan jenis, jumlah, dan sifatnya.
      ii) Pengumpulan sampah dari sumber ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan terpadu.
      iii) Pengangkutan sampah dari sumber atau tempat penampungan menuju lokasi pemrosesan akhir.

iv) Pengolahan sampah untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlahnya.
v) Pemrosesan akhir sampah agar residu dapat dikembalikan ke lingkungan secara aman.

i) Penghambat

Faktor Penghambat dalam pengelolaan sampah di kawasan tersebut yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat dan pengunjung dalam membuang sampah pada tempatnya, keterbatasan fasilitas persampahan, serta sistem pengangkutan sampah yang belum optimal. Selain itu, kondisi kawasan pesisir yang sering menerima kiriman sampah dari laut juga menjadi kendala yang memperbesar jumlah sampah yang harus ditangani.

ii) Pendukung

Faktor Pendukung dalam pengelolaan sampah di kawasan wisata Hutan Mangrove Biringkassi meliputi dukungan pemerintah daerah dan pemerintah desa melalui penyediaan sarana dasar seperti kantong sampah, kegiatan sosialisasi, pelatihan, serta edukasi kepada masyarakat

mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan mitra eksternal turut membantu pelaksanaan pengelolaan sampah agar berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.

2.7 Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis hasil observasi, wawancara dan hasil lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya dalam temuan bagi orang lain.(Oktober et al. 2022)

Mendeskripsikan data adalah Proses menggambarkan, meringkas, dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi subjek atau fenomena yang diteliti. Ini dilakukan dengan menggunakan metode statistik seperti ukuran tendensi sentral (rerata, median) dan ukuran variabilitas (rentang, deviasi standar) untuk menyajikan data agar lebih mudah dipaham.

A. Pengumpulan data

Proses pengumpulan data atau informasi melalui wawancara terhadap informan kunci yang berkaitan atau selaras dengan penelitian dan disertai observasi langsung ke lapangan untuk

menunjang penelitian yang dilakukan sehingga mendapatkan data yang diharapkan(Islam and Jakarta 2024).

B. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan, pemilihan, pemusatan perhatian, dan pengorganisasian data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah wisata.(Rijali 2018)

C. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan untuk menampilkan hasil temuan lapangan secara sistematis dan terorganisir agar mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang terdiri dari pihak Dinas Lingkungan Hidup,Pemerintah Desa Biringkassi,masyarakat, dan pengunjung wisata(Maulina and Jannah 2025)

D. Penarikan Kesimpulan

Adapun proses penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir yang dilakukan secara cermat di lapangan sehingga data-data dapat diuji validitasnya.